



EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM GERDU KEMPLING DI KECAMATAN SEMARANG BARAT

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id/> Email: fisip@undip.ac.id

Rudi Santoso Adi, Drs. Ahmad Taufiq, M.Si, Supratiwi, S.sos, M.Si

Abstract-In efforts to achieve the vision of Semarang City as the trade and cultural services to the public welfare, the government implement Sapta program, one of which is Gerdu Kempling program (Integrated Movement in Alleviation of Poverty in Health, Economy, Education, Infrastructure, and Environment Sectors), a program that focuses on the areas of poverty reduction. Although it has been carefully designed, but nature doing so, the program still encounters many obstacles and shortcomings. An example is in the District of West Semarang. In 2007 West Semarang district representing as the urban poverty since the West Semarang district has the most impoverished families among existing districts. However, the people in this region in average did not know very well about the program and the program is less known by the public at large, whereas they are the main target of the program that was launched in March 2011. This study aims to determine the implementation of the Gerdu Kempling program in the District of West Semarang as well as to determine the supporting and inhibiting factors in the implementation of the program.

This study is an evaluative research, which undergo assessment studies for the implementation of government policy, particularly on the Gerdu Kempling program in West Semarang District in accordance with the goals, objectives, and the impact of items desired by using a qualitative approach. Sources of data are primary data that directly obtained through field observations and interviews with the Local Government (LG) of Semarang and West Semarang District. After the data reduction, the results of evaluative research will be presented analytically.

The results showed: 1) Kempling Gerdu Program still not fully known and understood by the public as an object of policy, it is caused by the lack of systematic program, less the maximum government in fostering citizens to develop their business, especially in the capital for the business community; 2) The supporting factors that support the implementation of programs is Gerdu Kempling program are good coordination and synergy between Semarang City Government bureaucrats with stakeholders, the funding and business facilities of the CSR program of the business world (banks, state / local enterprises and private), as well as quite effective guidance on education and training of Semarang City Government to the program implementers. While the inhibiting factors are: the lack of response from the community of inmates, the lack of understanding to the Gerdu Kempling program, the limited funding and facilities budget of Semarang City Government as well as from the stakeholders and the lack of socialization of the program in Semarang city residents.

Keywords: *Sapta program, Poverty Alleviation Program, the City of Semarang, Gerdu Kempling.*

This study is a qualitative research with non-

I. PENDAHULUAN

Dalam upaya mewujudkan visi Semarang sebagai kota perdagangan dan jasa yang berbudaya menuju masyarakat sejahtera, Pemerintah Kota Semarang melaksanakan sapta program yang terdiri dari penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran, rob dan banjir, pelayanan publik, tata ruang dan



infrastruktur, kesetaraan dan keadilan gender, pendidikan serta kesehatan masyarakat.

Selain Sapta Program, dalam hal penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kota Semarang juga meluncurkan program Gerdu Kempling sejak Maret 2011 lalu. Gerdu Kempling adalah kependekan dari Gerakan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesehatan, Ekonomi, Pendidikan, Infrastruktur, dan Lingkungan.

Melalui program Gerdu Kempling ini diharapkan angka kemiskinan Kota Semarang yang saat ini mencapai 24,61% atau sebesar 111.558 KK (398.009 jiwa) dapat berkurang 2% atau lebih setiap tahunnya sampai dengan tahun 2015. Rencananya program ini akan dilakukan dua kali dalam setahun secara bertahap. Untuk tahap pertama (2011) ditetapkan 32 kelurahan sebagai project pilot. Selanjutnya 48 kelurahan pada 2012 dan 2013, 32 kelurahan pada tahun 2014 serta 17 kelurahan pada tahun 2015 sehingga total 117 kelurahan di Kota Semarang.

Program Gerdu Kempling merupakan wujud dari program kemitraan antara Pemerintah, Swasta/Kelompok Peduli (termasuk Perguruan tinggi dan LSM) serta Masyarakat. Dalam wacana kemitraan hal tersebut dikenal sebagai PPCP (*Public, Private and Community Partnership*). PPCP merupakan kemitraan antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat yang secara bersama-sama melakukan kerjasama dalam pembangunan dan atau pengelolaan prasarana dan sarana.

Strategi yang digunakan untuk mensukseskan program ini adalah melalui pendekatan kewilayahan dengan melibatkan berbagai unsur seperti kelurahan, kecamatan, perguruan tinggi, dunia usaha, serta masyarakat. Dari kalangan dunia usaha bahkan dikabarkan telah membentuk konsorsium untuk penggalangan dana.¹ Beberapa bank juga sudah menjanjikan mengakomodasi ajakan Wali Kota dalam bentuk program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan sasaran masyarakat miskin di Kota Semarang. Sedangkan dari kalangan perguruan tinggi diwakili oleh Universitas Diponegoro dan Universitas Negeri Semarang yang memiliki program wilayah binaan di Kecamatan Tembalang, Tugu, Semarang Utara, Mijen, dan Gunungpati.

Dari perbankan, BNI, Bank Mandiri, BRI dan Bank Jateng telah memberikan dukungan untuk program ini berupa bantuan finansial, dimana seluruh bantuan akan diberikan langsung kepada masyarakat. Pemerintah hanya sebagai fasilitator yang mensinergikan berbagai kegiatan dalam program Gerdu Kempling.

Secara konseptual program tersebut nampak sejalan dengan paradigma pembangunan dewasa ini yang menempatkan masyarakat bukan lagi sebagai obyek pembangunan. Meski demikian, pada tataran praktis implementasi konsep tersebut tentu saja harus dibuktikan. Merujuk pendapat Moeljarto Tjokrowinoto,² ciri-ciri pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (manusia) adalah; *Pertama*, prakarsa dan proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tahap demi tahap harus diletakkan pada masyarakat sendiri. *Kedua*, fokus utamanya adalah meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memobilisasikan sumber-sumber yang terdapat di komunitas untuk memenuhi kebutuhan mereka.; *Ketiga*, pendekatan ini mentoleransi variasi lokal dan karenanya sifatnya fleksibel. menyesuaikan dengan kondisi lokal. *Keempat*, di dalam melaksanakan pembangunan, pendekatan ini menekankan pada proses sosial learning yang di dalamnya terdapat interaksi kolaboratif antara birokrasi dan komunitas mulai dari proses perencanaan sampai evaluasi proyek dengan mendasarkan diri saling belajar; *Kelima*, proses pembentukan jaringan (*networking*) antara birokrasi dan lembaga swadaya masyarakat, satu-satuan organisasi tradisional yang mandiri, merupakan bagian integral dari pendekatan ini, baik untuk meningkatkan kemampuan mereka mengidentifikasi dan mengelola pelbagai sumber, maupun untuk menjaga keseimbangan antara struktur vertikal maupun horizontal.

Meski telah dirancang dengan seksama, namun alam pelaksanaannya, program Gerdu Kempling masih menemui berbagai kendala dan kekurangan. Sebagai contoh adalah wilayah Kecamatan Semarang Barat. Di wilayah ini, rata-rata masyarakat belum mengetahui betul tentang program Gerdu Kempling dan program ini kurang

¹ Suara Merdeka, 22/3/2012

² Moeljarto Tjokrowinoto. 1987. *Politik Pembangunan: Sebuah Analisis Konsep Arah dan Strategi*. Yogyakarta: Tiara Wacana. Hal. 26



dikenal oleh masyarakat secara luas, maka masih perlu disosialisasikan lagi ke tingkat lebih bawah.

Pada tahun 2007 kecamatan Semarang Barat mewakili kemiskinan masyarakat perkotaan karena kecamatan Semarang Barat mempunyai keluarga miskin terbanyak diantara kecamatan kota yang ada.³ Dengan pelaksanaan program Gerdu Kempling ini di kecamatan Semarang Barat apakah tingkat kemiskinan dapat ditekan atau setidaknya kemiskinan di kecamatan Semarang Barat dapat berkurang.

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan, maka tujuan studi ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan program Gerdu Kenpling di Kecamatan Semarang Barat serta untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program Gerdu Kempling di Kecamatan Semarang Barat.

II. KERANGKA TEORI / TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik (*Public Policy*)

Definisi mengenai kebijakan publik diberikan oleh Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan, mereka mengatakan bahwa arti kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai, dan praktek-praktek terarah. Pengertian berikutnya dikemukakan oleh James A. Anderson, bahwa kebijakan adalah suatu rangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang utama pelaku atau sekelompok orang guna memecahkan suatu masalah tertentu.⁴

Kebijakan merupakan akumulasi hasil dan kegiatan yang bersifat implemental. Lowi mengemukakan bahwa kebijakan sebagai pernyataan yang dibuat oleh otoritas pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi perilaku warga Negara dengan menggunakan sanksi-sanksi yang positif dan negatif.⁵

James Anderson sebagai pakar kebijakan publik menetapkan dalam rangka memecahkan masalah ada beberapa tahap penting antara lain:⁶ 1) Penetapan agenda kebijakan (*agenda setting*); 2) Formulasi kebijakan (*policy formulation*); 3) Adopsi kebijakan (*policy adoption*) ; 4) Implementasi kebijakan (*policy implementation*); dan 5) Penilaian kebijakan (*policy assessment*).

B. Evaluasi

Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Tanpa evaluasi, maka tidak akan diketahui bagaimana kondisi objek evaluasi tersebut dalam rancangan, pelaksanaan serta hasilnya. Istilah evaluasi sudah menjadi kosa kata dalam bahasa Indonesia, akan tetapi kata ini adalah kata serapan dari bahasa Inggris yaitu *evaluation* yang berarti penilaian atau penaksiran.⁷ Sedangkan menurut pengertian istilah “evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu obyek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan.

Dalam keberhasilan ada dua konsep yang terdapat didalamnya yaitu efektifitas dan efisiensi. “Efektifitas merupakan perbandingan antara output dan inputnya sedangkan efisiensi adalah taraf pendayagunaan input untuk menghasilkan output lewat suatu proses”.⁸

C. Program

Program adalah cara yang dipisahkan untuk mencapai tujuan. Dengan adanya program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan. Hal ini mudah

⁶ Subarsono, AG, 2005, *Analisis Kebijakan Publik : Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar., Hal. 2

⁷ Echols, M, John, Shadily, Hassan, 2000. *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia. Hal 220.

⁸ <http://evaluasi-pendidikan.blogspot.com/2008/03/evaluasi-program-sebuah-pengantar.html>. Diakses pada tanggal 5 Desember 2012, pukul 01.00 wib

³ Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2007

⁴ James E. Anderson, 1979. *Public Policy Making*, Holt, Rinehart and Winston, New York. Hal. 3

⁵ Ali Mufiz. 2004. *Pengantar Administrasi Negara*. Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka. Hal. 103.



dipahami, karena program itu sendiri menjadi pedoman dalam rangka pelaksanaan program tersebut.

Program merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan pelaksanaan karena dalam program tersebut telah dimuat berbagai aspek, yang antara lain adalah:

- 1) Adanya tujuan yang ingin dicapai
- 2) Adanya kebijakan-kebijakan yang harus diambil dalam pencapaian tujuan itu
- 3) Adanya aturan-aturan yang dipegang dengan prosedur yang harus dilalui
- 4) Adanya perkiraan anggaran yang perlu atau dibutuhkan
- 5) Adanya strategi dalam pelaksanaan.

Program merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan pelaksanaan karena dalam program tersebut telah dimuat berbagai aspek, yang antara lain adalah:

- 1) Adanya tujuan yang ingin dicapai
- 2) Adanya kebijakan-kebijakan yang harus diambil dalam pencapaian tujuan itu
- 3) Adanya aturan-aturan yang dipegang dengan prosedur yang harus dilalui
- 4) Adanya perkiraan anggaran yang perlu atau dibutuhkan
- 5) Adanya strategi dalam pelaksanaan.

Unsur keduanya yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan program adalah adanya kelompok orang yang menguji sasaran program sehingga kelompok orang tersebut merasa ikut dilibatkan dan membawa hasil program yang dijalankan dan adanya perubahan dan peningkatan dalam kehidupannya. Bila tidak memberikan manfaat pada kelompok orang maka boleh dikatakan program tersebut telah gagal dilaksanakan.

D. Definisi Operasional

Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap pelaksanaan program Gerdu Kempling di Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang yang diukur dengan indikator sebagai berikut :

- 1) Ketercapaian Program
 - a) Proses terbentuknya tujuan program
 - b) Aplikasi tujuan program
 - c) Keefektifan prosedur dalam penacapaian tujuan
 - d) Perkembangan program kearah tujuan
 - e) Kesesuaian rencana dengan implementasi
 - f) Kemampuan personel
 - g) Prioritas mencapai tujuan
 - h) Tahapan pencapaian tujuan program
- 2) Ketepatan pencapaian program
 - a) Kesesuaian tujuan dengan hasil
 - b) Hambatan dalam mencapai tujuan
 - c) Perlu/tidaknya tujuan diganti
 - d) Tujuan program yang baik di masa depan

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian evaluatif. Oleh karena itu penelitiannya berupaya melakukan penilaian atas pelaksanaan kebijakan pemerintah, khususnya tentang program Gerdu Kempling di Kecamatan Semarang Barat. Penelitian ini akan mengevaluasi pelaksanaannya sesuai dengan tujuan, sasaran, dampak serta pos-pos yang diinginkan. Penelitian ini juga berupaya menganalisa berbagai kendala yang dihadapi dalam program Gerdu Kempling di Kota Semarang.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu studi yang menekankan pada upaya investigatif untuk mengkaji secara *natural* (alamiah) fenomena yang tengah terjadi dalam keseluruhan kompleksitasnya⁹

Data yang secara langsung diperoleh melalui observasi di lapangan dan melalui wawancara yang berkaitan dengan permasalahan yang ada pada pelaksanaan program Gerdu Kempling Kota Semarang oleh Pemerintah Daerah (PEMDA) Kota Semarang pada umumnya dan di Kecamatan Semarang Barat pada khususnya.

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah melakukan penyajian data dalam bentuk deskriptif. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan

⁹ Sastradipoera, 2005, "Mencari Makna Dibalik Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi". Bandung: Kappa-Sigma. Hal. 226



sejenisnya. Pada penulisan skripsi ini penulis memfokuskan pada program Gerdu Kempling di Kecamatan Semarang Barat.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketercapaian Program

Sebagian besar masyarakat di Kecamatan Semarang Barat mengetahui tujuan dari program Gerdu Kempling, namun mereka hanya mengetahui sebatas pemberian bantuan kepada masyarakat miskin, belum mengerucut kepada pengentasan masyarakat miskin.

Masyarakat yang cukup mengetahui adalah golongan pegawai negeri dan masyarakat terdidik yang notabene tengah atau telah mengenyam pendidikan yang tinggi. Mereka yang mengaku mengetahui mendapat informasi dari spanduk, relasi atau tetangga. Sebagian masyarakat yang kurang mengetahui menyatakan kurang ada sosialisasi dari pemerintah. Mereka hanya mendapat pendataan dari kelurahan dan diberi keterangan termasuk dalam peserta program Gerdu Kempling atau tidak.

Proses Program Gerdu Kempling adalah adanya kesadaran bahwa pengentasan kemiskinan merupakan hak fundamental bagi setiap warga negara sebagaimana diamanahkan dalam konstitusi. Negara bertanggung jawab dalam mengatur kondisi agar masyarakat dapat terpenuhi haknya. Dengan adanya asas desentralisasi, pemerintah daerah juga bertanggung jawab untuk menjamin program pengentasan kemiskinan terutama bagi masyarakat miskin yang kurang mempunyai pekerjaan tetap.

1. Aplikasi Tujuan Program

Program Gerdu Kempling yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Kota Semarang pada tanggal 24 Maret 2011 dan masih dipertahankan sampai sekarang dimana program Gerdu Kempling telah memasuki tahun kedua. Berdasarkan maksud dan tujuan daripada Gerdu Kempling menyiratkan bahwa

tujuan dari program Gerdu Kempling dapat diaplikasikan dengan adanya sumber daya manusia berupa sarana untuk penanggulangan kemiskinan yang memberikan pelayanan berupa bantuan modal usaha dan pelatihan kepada masyarakat miskin. Hal

Tujuan dari program Gerdu Kempling dapat diaplikasikan dengan adanya sumber daya manusia dan sarana yang diberikan. Penanggulangan kemiskinan yang dimaksudkan adalah pemberian bantuan berupa uang tunai untuk bantuan modal usaha maupun bantuan pelatihan gratis untuk membangun suatu usaha sendiri yang ditujukan kepada masyarakat miskin guna mengembangkan usahanya.

Masyarakat mengaku mendapatkan kemudahan dalam akses terhadap penerimaan bantuan sehingga masyarakat menyatakan bahwa tujuan program Gerdu Kempling cukup dapat diaplikasikan. Sementara sebagian besar masyarakat di Kecamatan Semarang Barat menyatakan bahwa tujuan program Gerdu Kempling dapat diaplikasikan karena dengan adanya program Gerdu Kempling memang membawa perubahan dalam pengentasan kemiskinan. Melalui program Gerdu Kempling jumlah warga miskin dapat tertangani minimal 2% per tahun yang merupakan target dari pemerintah Kota Semarang.

2. Keefektifan Prosedur dalam Pencapaian Tujuan

Kegiatan penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan dalam upaya untuk mencapai visi kota Semarang. Target penurunan angka kemiskinan 2 (dua) % per tahun sebagaimana diamanatkan Perda. No. 12 tahun 2010, tentang RJPMD Kota Semarang tahun 2010 -2015, merupakan fokus pembangunan kota Semarang dengan program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Kegiatan ini diperuntukan bagi masyarakat kurang mampu atau miskin



untuk mendapatkan bantuan. Masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai bantuan dengan prosedur yang ditentukan. Prosedur dalam memperoleh bantuan dengan program Gerdu Kempling di kantor Kecamatan Semarang Barat sudah terpasang, sehingga dalam rangka pencapaian tujuannya sudah sangat efektif, karena setiap ada masyarakat yang datang, pegawai Kecamatan Semarang Barat selalu memberikan informasi yang sebaik-baiknya dan sudah ada petunjuk pelaksanaan sehingga pihak-pihak yang terlibat tinggal melaksanakannya.

Prosedur dalam rangka pencapaian tujuan program Gerdu Kempling sudah efektif, karena dari pihak pemerintah dalam hal ini adalah Kantor Kecamatan Semarang Barat, sudah memberikan pedoman yang jelas bagi pelaksanaan di lapangan. Dari pihak pemberi bantuan permodalan dan pelatihan juga sudah memberikan informasi yang optimal kepada peserta program Gerdu Kempling.

Pelaksanaan program Gerdu Kempling di lapangan oleh masyarakat dinilai kurang efektif karena pemberi pelayanan bantuan permodalan dan pelatihan kurang dapat memberikan pelayanan yang cepat dan efektif. Namun dana permodalan dan bantuan pelatihan serta fasilitas sarana dan prasarana tetap dapat dinikmati oleh masyarakat.

3. Perkembangan Program ke Arah Tujuan

Program Gerdu Kempling memungkinkan masyarakat miskin atau tidak mampu untuk memperoleh bantuan berupa sarana dan prasarana serta bantuan permodalan bagi yang mempunyai usaha. Pemberian bantuan ditujukan agar tujuan dari program Gerdu Kempling dapat tercapai. Adapun perkembangan program Gerdu Kempling selama 2 tahun berjalan sudah mengupayakan peningkatan akses dan mutu masyarakat.

Pelaksanaan program Gerdu Kempling itu adalah bertahap dan tidak secara cepat dan

instan dapat merubah warga masyarakat, tetapi melalui suatu proses yang membutuhkan waktu.

4. Kesesuaian Rencana dengan Implementasi

Kesesuaian antara rencana dan implementasi program Gerdu Kempling terus dilakukan pemerintah kota Semarang melalui berbagai kebijakan dan program berbasis pada pemberdayaan masyarakat, dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan di Kota Semarang telah meluncurkan program penanggulangan kemiskinan yaitu Gerdu Kempling.¹⁰

Perencanaan dalam program Gerdu Kempling dilakukan oleh masing-masing pihak secara bersama-sama, sehingga terjadi suatu sinergitas antar *stakeholder* yang ada dalam pencapaian tujuan program. Disini diperlukan kebersamaan dari para *stakeholder*, karena program ini tidak bisa berjalan tanpa dukungan dari para *stakeholder* tersebut. Dari pihak pemerintah, perencanaan dilakukan secara general berkenaan dengan implementasi program. Pemerintah mempersiapkan regulasi sebagai bahan acuan pelaksanaan dan pedoman evaluasi.

5. Kemampuan Personel

Pelaksanaan dan pengelolaan program Gerdu Kempling melibatkan banyak pihak. Secara lebih rinci pihak-pihak yang terlibat antara lain swasta, pelaku usaha, perguruan tinggi, LSM dan masyarakat. Berkenaan dengan kemampuan para pihak dalam melaksanakan dan mengelola program Gerdu Kempling, mempunyai sumber-sumber yang memadai karena kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sudah sesuai dengan bidangnya masing-masing, sehingga pihak-pihak yang terlibat sudah mumpuni dan berpengalaman dengan baik yang berusaha menjalankan program dengan sebaik mungkin.

¹⁰ Setahun Gerdu Kempling, 2012, Hal. 1



Personel program Gerdu Kempling sudah mempunyai kemampuan yang baik, yang terdiri dari pemkot, skpd, LSM perguruan tinggi negeri maupun swasta dan pengusaha adalah merupakan para *stakeholder* yang berpengalaman dibidangnya sehingga dalam pemberian bantuan berupa modal usaha dan pelatihan berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan program.

6. Prioritas Mencapai Tujuan

Banyak hal yang harus diperhatikan dalam implementasi sebuah program, namun ada hal-hal penting yang harus menjadi prioritas agar tujuan dari program dapat tercapai. Prioritas dalam pencapaian tujuan program Gerdu Kempling.

Prioritas yang diambil dalam pelaksanaan program Gerdu Kempling adalah masyarakat miskin yang mempunyai usaha maupun tidak mempunyai usaha dengan cara dibekali pelatihan usaha.

7. Tahapan Pencapaian Tujuan Program

Tujuan program Gerdu Kempling dapat dicapai dengan tahapan-tahapan pencapaian tujuan. Tahapan tujuan program :¹¹

- a) Survey awal
- b) Rembug warga (Moderator PTN/PTS, LSM, CSR, Pemkot)
- c) Identifikasi/pemetaan masalah
- d) Prioritas program dan sasaran
- e) Program dan Kegiatan

Hal senada juga disampaikan oleh Endang Supatmi selaku Kasi Kesos Kelurahan Kembang Arum :

“...tahapan ada 5, pembentukan kelompok usaha baru dulu, kemudian pengembangan kelompok usaha warga miskin, kemudian tercipta kemandirian kelompok usaha warga miskin, kemudian kelompok usaha membantu warga miskin lain...”¹²

B. Ketepatan Pencapaian Tujuan

1. Kesesuaian Tujuan dengan Hasil

Masyarakat menyatakan tujuan program Gerdu Kempling sesuai dengan hasil yang didapatkan, dengan adanya program Gerdu Kempling maka masyarakat sudah mempunyai akses untuk menikmati bantuan permodalan dan pelatihan usaha. Namun ada beberapa kesalahan pendataan dari pemerintah sehingga ada masyarakat miskin atau tidak mampu yang tidak terdaftar sebagai peserta program Gerdu Kempling, karena alasan itulah maka masyarakat mengaku tujuan program tersebut kurang sesuai dengan hasil yang diperoleh.

Berdasarkan laporan tahunan program Gerdu Kempling di Kecamatan Semarang Barat, faktor-faktor yang mendukung keberhasilan program tersebut adalah :

- 1) Kemudahan prosedur program Gerdu Kempling

Prosedur yang jelas dan mudah kepada masyarakat miskin menjadikan masyarakat tidak kerepotan untuk mengurus persyaratan administrasi di penyedia pelayanan. Walaupun terkadang hal yang mudah ini terkendala dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat akan prosedur pelayanan. Namun berdasarkan kuesioner yang disebar oleh pemerintah, masyarakat Kecamatan Semarang Barat mengetahui tentang persyaratan dan prosedur program Gerdu Kempling.

¹¹ Setahun Gerdu Kempling, 2012. Hal. 22

¹² Hasil wawancara dengan Endang Supatmi selaku Kasi Kesos Kelurahan Kembang Arum Semarang Barat, pada tanggal 3 Juni 2013 pukul 8.35 WIB di Kantor Kelurahan Kembang Arum Semarang Barat



- 2) Koordinasi yang bagus antara pihak yang terlibat

Untuk meningkatkan koordinasi antar unsur Gerdu Kempling, dilakukan pertemuan koordinasi minimal 1 kali dan pada akhirnya koordinasi ini berjalan 2 sampai 3 kali selama tahun berjalan. Fungsi dari koordinasi antar pihak yang terlibat adalah untuk mengoreksi pelaksanaan program sudah sesuai dengan perencanaan program atau belum, dan mengetahui kelebihan dan kelemahan dari program yang sudah dijalankan.

2. Hambatan dalam Mencapai Tujuan

Kelancaran pencapaian tujuan atau hasil program Gerdu Kempling tidaklah terlepas dari berbagai hambatan. Berdasarkan laporan tahunan program Gerdu Kempling di Kecamatan Semarang Barat, hambatan dalam pencapaian tujuan program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Belum adanya kartu peserta Gerdu Kempling, untuk itu diupayakan adanya *database* kepesertaan yang dapat diakses di Kantor Kecamatan Semarang Barat maupun di penyedia pelayanan masyarakat.
2. Alokasi anggaran Program Gerdu Kempling yang masih sering terlambat pencairannya, sehingga pelaksanaan program juga agak terlambat.
3. Beban kerja yang tinggi kurang diimbangi dengan tenaga kerja yang ada.
4. Masyarakat sulit memenuhi persyaratan administrasi.

Adanya hambatan atau kendala yang didapat oleh personil program Gerdu Kempling sudah diimbangi dengan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut, sehingga dapat diminimalisasi. Dengan adanya upaya tersebut diharapkan tujuan program Gerdu Kempling dapat dicapai.

3. Perlu/Tidaknya Tujuan Diganti

Seluruh masyarakat menilai bahwa tujuan program Gerdu Kempling tidak perlu diganti, dengan kata lain perlu dipertahankan. Masyarakat menilai bahwa program Gerdu Kempling sangat memberi manfaat bagi masyarakat miskin dan manfaat itu masih diharapkan keberadaannya oleh masyarakat.

Para informan mengaku bahwa tujuan program Gerdu Kempling sudah baik, hanya perlu pembenahan diberbagai segi, pertama yaitu sasaran hendaknya diperluas, kedua implementasi harus selalu diperbaiki setiap tahunnya agar masyarakat mendapatkan bantuan permodalan usaha dan pelatihan secara maksimal.

4. Tujuan Program yang Baik di Masa Depan

Tujuan yang baik dimasa depan merupakan cita-cita dari pemerintah kota Semarang, menjadikan program Gerdu Kempling sebagai landasan untuk menanggulangi dan mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.

Masyarakat sepertinya memimpikan sebuah program dari pemerintah yang menjamin masyarakat miskin untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya. Selain itu diharapkan pemerintah melibatkan peran serta masyarakat sehingga tercipta program yang berbasis masyarakat.

V. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Tujuan program Gerdu Kempling dapat dikatakan kurang tercapai, ini terbukti Program Gerdu Kempling yang sudah berjalan, masih belum sepenuhnya diketahui dan dimengerti oleh masyarakat sebagai obyek kebijakan. Sehingga partisipasi masyarakat kurang. Dari tujuan program Gerdu Kempling cukup dapat diaplikasikan, tetapi prosesnya berjalan dengan kurang efektif. Setelah dievaluasi ternyata masih ada beberapa hal yang perlu diefektifkan dan diefisienkan yaitu pada ketercapaian program dan ketepatan pencapaian programnya. Pada sisi ketercapaian dan ketepatan program, ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu



kurang sistematisnya program, kurang maksimalnya pemerintah dalam membina warga untuk mengembangkan usahanya, terutama dalam permodalan usaha bagi masyarakat.

Pencapaian tujuan program Gerdu Kempling dapat dikatakan sudah tepat, tetapi hasil dan pelaksanaannya kurang efektif, terbukti dari hasil yang dirasakan kurang maksimal, seperti warga yang layak menerima belum keseluruhan menerima dan yang menerima permodalan pun kurang mampu mengelola dengan baik usahanya.

Faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi kinerja dan pelaksanaan program Gerdu Kempling di kecamatan Semarang Barat dapat disimpulkan bahwa :

a) Faktor-faktor pendukung :

- Adanya koordinasi dan sinergitas program antara aparat birokrasi Pemkot Semarang dengan para *stakeholders* telah mengefektifkan kendali dan supervisi pimpinan/pengawas kepada para pelaksana program.
- Adanya bantuan dana dan sarana usaha dari program CSR kalangan dunia usaha (Perbankan, BUMN/ BUMD dan swasta) telah meningkatkan semangat pelaksana program.
- Cukup efektifnya bimbingan dan pelatihan dari SKPD Pemkot Semarang kepada para pelaksana program.

b). Faktor-faktor penghambat :

- Masih kurangnya respon dari masyarakat warga binaan.
- Banyak masyarakat yang kurang memahami akan program Gerdu Kempling, jadi partisipasi masyarakat kurang.
- Terbatasnya bantuan dana dan sarana baik anggaran dari Pemkot Semarang maupun dari para *stakeholders*.
- Masih kurangnya sosialisasi program Gerdu Kempling pada warga masyarakat kota Semarang.

Di samping itu faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja pelaksana program Gerdu kempling, yaitu :

- 1) Adanya berbagai perkembangan tuntutan masyarakat seiring dengan pengaruh globalisasi dan modernisasi di Semarang.
- 2) Adanya perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat karena perkembangan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

- 3) Adanya kelompok-kelompok sosial minoritas dengan mayoritas yang ditandai dengan perbedaan kondisi sosial ekonomi masing-masing.

B. Saran

1. Kinerja Pelaksana Gerdu Kempling dalam mengatasi kemiskinan Kota Semarang hendaklah mengacu pada peningkatan kualitas dan daya dukung dari tiga sumber yaitu:
 - a) Ditingkatkannya kualitas sumber daya manusia pelaksana,
 - b) Tercukupinya sumber dana dan sarana program,
 - c) Ditingkatkannya upaya perbaikan kondisi lingkungan aparat birokrasi (internal dan eksternal).
2. Sosialisasi kepada masyarakat tentang pengertian dan manfaat program Gerdu Kempling harus ditingkatkan dan dimaksimalkan, sehingga masyarakat mengerti dan paham akan manfaat program Gerdu Kempling.
3. Peningkatan kerjasama semua elemen masyarakat dalam Gerdu Kempling mutlak perlu, hal ini untuk mengurangi pandangan negatif tentang birokrasi Pemerintah Kota Semarang di masyarakat, seperti :
 - a) Masih adanya sebagian masyarakat yang skeptis dan apatis terhadap Pemerintah Kota Semarang.
 - b) Adanya stigma berurusan dengan Pemangku Kepentingan berbelit-belit dan serba uang.
4. Adanya intensitas sosialisasi visi dan misi Gerdu Kempling secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali Mufiz. 2004. *Pengantar Administrasi Negara*. Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.



JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

Volume : Nomor: Tahun 2013 Halaman

<http://www.fisipundip.ac.id>

- Ambarsari, Anita Dewi, et. al. 2002. *Kebijakan Publik dan Partisipasi Perempuan*. Jakarta: Pattiro.
- Anita Dewi Ambarsari, et.all. 200). *Kebijakan Publik dan Partisipasi Perempuan*. Jakarta: Pattiro.
- Arikunto, Suharsimi. 2009, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik", Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik. 2009. *Data dan Informasi Kemiskinan Buku 2 Kabupaten/Kota*. Badan Pusat Statistik : Semarang.
- Bambang Sunggono, 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bappeda Kota Semarang, 2007
- Brigdman dan Davis (2004) *The Australian Policy Handbook*, Crows Nest:Allen and Unwin.
- Budi Winarno. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: PT Buku Kita.
- Budiman, Arif. 1996. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Gramedia Pustaka Utama Jakarta
- Daryanto, *Evaluasi Pendidikan*, Jakarta : Rineka Cipta, 2010.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho, 2006, *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*, Jakarta : Gramedia.
- Echols, M, John, Shadily, Hassan, 2000. *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- Husein Umar, 2003, "Evaluasi Kinerja Perusahaan", Jakarta : PT Gramedia. Pustaka Utama.
- Islamy, M. Irfan, 1994, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Cetakan Ketujuh, Jakarta: Bumi Aksara.
- Ismail Nawawi, *Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*, PMN Surabaya, 2009.
- James E. Anderson, 1979. *Public Policy Making*, Holt, Rinehart and Winston, New York.
- M. Irfan Islamy, 1994, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Cetakan Ketujuh, Jakarta: Bumi Aksara.
- Moeljarto Tjokrowinoto. 1987. *Politik Pembangunan: Sebuah Analisis Konsep Arah dan Strategi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Ninik Sudarwati, 2009. *Kebijakan Pengentasan Kemiskinan : Mengurangi Kegagalan Penanggulangan Kemiskinan*. Intimedia: Malang.
- Parsudi Suparlan, 1993, *Kemiskinan di Perkotaan*, Jakarta: PT. Obor indonesia.
- Riant Nugroho Dwidjowijoto, 2006, *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*, Jakarta : Gramedia.
- Robert T. Dye, 1978, *Understanding Public Policy*, New Jersey : Prentice Hall, Inc.
- Sastradipoera, 2005, "Mencari Makna Dibalik Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi". Bandung: Kappa-Sigma.
- Solichin Abdul Wahab, 2001, *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Suara Merdeka, 22/3/2012
- Subarsono, AG, 2005, *Analisis Kebijakan Publik : Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sudarwati, Ninik. 2009. *Kebijakan Pengentasan Kemiskinan : Mengurangi Kegagalan Penanggulangan Kemiskinan*. Intimedia: Malang.
- Suharsimi Arikunto, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, Rineka Cipta. Hal. 135.
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Suparlan, Parsudi, 1993, *Kemiskinan di Perkotaan*, Jakarta: PT. Obor indonesia.
- Tjokrowinoto, Moeljarto. 1987. *Politik Pembangunan*, Yogyakarta: Tiara Wacana
- Tri Pranadji dalam Saptana dan Valeriana Darwis. *Keefektifan Koordinasi Kelembagaan Dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah*.



JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

Volume : Nomor: Tahun 2013 Halaman

<http://www.fisipundip.ac.id>

Wahab, Solichin Abdul, 2001, *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.

<http://evaluasipendidikan.blogspot.com/2008/03/evaluasi-program-sebuah-pengantar.html>. Diakses pada tanggal 5 Desember 2012, pukul 01.00 wib

Non Buku:

<http://evaluasipendidikan.blogspot.com/2008/03/evaluasi-program-sebuah-pengantar.html>.

http://www.hefp.lshtm.ac.uk/publications/downloads/working_papers/01_96.pdf
http://www.hefp.lshtm.ac.uk/publications/downloads/working_papers/01_96.pdf. Diakses pada tanggal 4 Desember 2012, pukul 01.00 wib.

<http://evaluasipendidikan.blogspot.com/2008/03/evaluasi-program-sebuah-pengantar.html>. Diakses pada tanggal 5 Desember 2012, pukul 10.00 wib

Laporan Evaluasi Gerdu Kempling Kecamatan Semarang Barat Tahun 2012

<http://evaluasipendidikan.blogspot.com/2008/03/evaluasi-program-sebuah-pengantar.html>. Diakses pada tanggal 5 Desember 2012, pukul 12.00 wib